

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi pada kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dapat diperoleh melalui situs website www.bps.com. Adapun variabel PAD dilihat dari empat komponen yaitu retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan variabel Dana Perimbangan dapat dilihat dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja modal dapat dilihat pada dana belanja modal. Semua pengujian dilakukan dengan menggunakan software SPSS dengan jumlah 111 data penelitian. Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dan pembahasan, maka diperoleh hasil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil dari pengujian hipotesis pertama adalah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya PAD merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang berasal dari potensi wilayahnya sendiri. Besarnya pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah dapat menjadi indikator kemandirian daerah yang semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah

untuk membiayai segala urusan pemerintahannya termasuk pemenuhan kebutuhan belanja modal.

2. Hasil dari pengujian hipotesis kedua adalah dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya pemerintah daerah yang mendapatkan dana perimbangan yang besar cenderung memiliki belanja modal yang besar, hal ini karena penggunaan dana perimbangan memang di tujukan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Penggunaan dana perimbangan memang di tujukan untuk membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah serta membangun infrastruktur. Semakin besar dana perimbangan maka semakin besar belanja modal.
3. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara PAD terhadap belanja modal. Artinya walaupun pendapatan asli daerah tinggi, namun tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya kecilnya belanja modal meskipun dengan adanya pertumbuhan ekonomi daerah baik, maka ada atau tidaknya pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tetap melakukan belanja modal. Maka pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kontribusi terhadap hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja modal.
4. Hasil dari pengujian hipotesis keempat yaitu pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara dana perimbangan terhadap belanja modal. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi dan ataupun rendah, pemerintah daerah tetap akan mendapatkan dana perimbangan dengan jumlah yang berbeda-

beda di setiap pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak terlalu khawatir terkait tingkat pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

5.2 **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini berusaha mengembangkan dari penelitian terdahulu. Peneliti menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini tidak bisa di gunakan secara generalisasi, tidak bisa digunakan untuk pemerintahan selain Provinsi Jawa Timur misalnya Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat.
2. Besarnya nilai koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh perubahan belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 64,3%, sedangkan sisanya 35,7% yang di pengaruhi oleh faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja modal.

5.3 **Saran**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, berdasarkan pada hasil penelitian, analisis, dan pembahasan, kesimpulan yang diambil dan keterbatasan penelitian, maka dapat diajukan saran penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian ulang dengan menggunakan provinsi jawa yang lainnya.
2. Dilihat dari nilai Adjusted R Square yang hanya sebesar 64,3% bahwa masih ada 35,7% variabel diluar topik penelitian yang berpengaruh

terhadap belanja modal, maka peneliti selanjutnya di harapkan untuk menambahkan variabel-variabel yang kemungkinan mampu untuk mempengaruhi belanja modal.



DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (n.d.). *Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Belanja di Provinsi Jawa Timur, 2017-2020*. Retrieved from <https://jatim.bps.go.id/>.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan*. Jakarta: Yayasan Pustaka.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Semarang.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS* (Edisi Sembilan ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia, P. P. (Nomor 23 Tahun 2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Irfan Ferdiansyah, D. R. (2018). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah*.
- Irwan, M. N. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating*. *Journal of Accounting Finance*.
- Jaeni, G. A. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*. 694.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, Januari 18). *DJPK*. Retrieved from <https://djp.kemenkeu.go.id/?p=1776>.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Ub Press.
- Kristianti, I. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi*.
- Kuznets, S. (2016). *Economic Growth and Income Inequality*. *The American*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Nomor 214/PMK.05/2013). *Tentang Bagan Akun Standar*.
- Nashsar, M. I. (2022). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel*.

moderasi. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (Nomor 58 Tahun 2005). Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (Nomor 71 Tahun 2010). Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (Nomor 13 Tahun 2005). Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (Nomor 22 Tahun 1999). Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Nomor 25 Tahun 2004.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (Nomor 28 Tahun 2009). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (Nomor 32 Tahun 2014). Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Nomor 33 Tahun 2004.

Prima Rohardian Sari, J. J. (2022, januari 25). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol 6 No 1 (2022).

Rendy Alvaro, A. P. (2020). *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi pada provinsi di Indonesia*. Jurnal Budget.

Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Steward, J. H. (1972). *Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution*. University of Illinois Press.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.

Sukirno. (2013). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. PT. RajaGrafindo Persada.

Vivi Oktavia, D. Z. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 19 Kabupaten dan*

Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021. Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

Waskito, Z. R. (2019). Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis . *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh, 226.*